**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018**

Jl. SALAK III NO. 38

Madiun - Jawa Timur 63131

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186

 e-mail : dil\_mil\_madiun@yahoo.co.id

**Jl. SALAK III NO. 38**

**Madiun - Jawa Timur**

****

**LAPORAN KEUANGAN**

**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018**

**BAGIAN ANGGARAN 005.05**

**DIRJEN BADILMILTUN MARI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. SALAK III NO. 38**

**Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186**

 **Madiun - Jawa Timur 63131**

 **e-mail : dil\_mil\_madiun@yahoo.co.id**

*KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian LKKL serta Peraturan Peraturan menteri Keuangan Nomor 225 / PMK.05 / 2016 tantang Penerapan Standart Akuntansi pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Madiun, 06 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Plh. Sekretaris

Gatot Suprapto

NIP. 196805031991031009

*DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

[Kata Pengantar i](#_Toc457811578)

[Daftar Isi ii](#_Toc457811579)

[Daftar Tabel dan Lampiran 1](#_Toc457811580)

[Pernyataan Tanggung Jawab iii](#_Toc457811581)

[Ringkasan 10](#_Toc457811582)

[I. Laporan Realisasi Anggaran 15](#_Toc457811583)

[II. Neraca 17](#_Toc457811584)

[III. Laporan Operasional 19](#_Toc457811585)

[IV. Laporan Perubahan Ekuitas 21](#_Toc457811586)

[V. Catatan atas Laporan Keuangan 23](#_Toc457811587)

[A. Penjelasan Umum 23](#_Toc457811588)

[A.1. Dasar Hukum 23](#_Toc457811589)

[A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun 24](#_Toc457811590)

[A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 25](#_Toc457811591)

[A.4. Basis Akuntansi 26](#_Toc457811592)

[A.5. Dasar Pengukuran 26](#_Toc457811593)

[A.6. Kebijakan Akuntansi 26](#_Toc457811594)

[B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 35](#_Toc457811595)

[B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 35](#_Toc457811596)

[B.2. Belanja 35](#_Toc457811597)

[C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 38](#_Toc457811598)

[C.1. Aset Lancar 38](#_Toc457811599)

[C.2. Aset Tetap 39](#_Toc457811600)

[C.5. Kewajiban Jangka Pendek 44](#_Toc457811601)

[C.6. Ekuitas 44](#_Toc457811602)

[D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 44](#_Toc457811603)

[D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 44](#_Toc457811604)

[D.2. Beban Pegawai 44](#_Toc457811605)

[D.3. Beban Persediaan 44](#_Toc457811606)

[D.4. Beban Jasa 45](#_Toc457811607)

[D.5. Beban Pemeliharaan 45](#_Toc457811608)

[D.6. Beban Perjalanan Dinas 46](#_Toc457811609)

[D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 46](#_Toc457811610)

[D.8. Beban Bantuan Sosial 47](#_Toc457811611)

[D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 48](#_Toc457811612)

[D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 48](#_Toc457811613)

[D.11. Beban Lain-lain 49](#_Toc457811614)

[D.12. Kegiatan Non Operasional 49](#_Toc457811615)

[D.13. Pos Luar Biasa 50](#_Toc457811616)

[E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 50](#_Toc457811617)

[E.1. Ekuitas Awal 50](#_Toc457811618)

[E.2. Surplus (defisit) LO 51](#_Toc457811619)

[E.3. Koreksi Nilai Persediaan 51](#_Toc457811620)

[E.4. Koreksi Aset Tetap 51](#_Toc457811621)

[E.5. Koreksi atas Beban 51](#_Toc457811622)

[E.6. Koreksi atas Pendapatan 52](#_Toc457811623)

[E.7. Ekuitas Akhir 52](#_Toc457811624)

[F. Pengungkapan Penting Lainnya 53](#_Toc457811625)

[F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 53](#_Toc457811626)

[F.2. Pengungkapan Lain-lain 53](#_Toc457811627)

[Laporan-laporan Pendukung 56](#_Toc457811628)

[Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 57](#_Toc457811629)

[Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akru 59](#_Toc457811630)

*DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

[Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 10](#_Toc457811631)

[Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017 11](#_Toc457811632)

[Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang 32](#_Toc457811633)

[Tabel 4 Tabel Masa Manfaat 33](#_Toc457811634)

[Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 35](#_Toc457811635)

[Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 36](#_Toc457811636)

[Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan 2017 36](#_Toc457811637)

[Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan 2017 37](#_Toc457811638)

[Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 38](#_Toc457811639)

[Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 38](#_Toc457811640)

[Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017 39](#_Toc457811641)

[Tabel 25 Rincian Aset Tetap 40](#_Toc457811642)

[Tabel 26 Rincian Saldo Tanah 40](#_Toc457811643)

[Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 43](#_Toc457811644)

[Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 58](#_Toc457811645)

*PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

**Pengadilan Militer III - 13 Madiun**

**Jl. SALAK III NO. 38 Madiun - Jawa Timur 63131**

 **Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186 e-mail : dil\_mil\_madiun@yahoo.co.id**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 11 Juli 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,

Plh. Sekretaris,

Gatot Suprapto

NIP. 196805031991031009

*RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun Semester I Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018*.*

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2018 adalah sebesar Rp. 4.556.000 atau mencapai 8.83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017

*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian |  TA 2018 |  TA 2017 |
|  | **Anggaran** | **Realisasi** | **% real. Thd anggaran** | **Realisasi** |
| Pendapatan Negara  | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
|  Belanja Negara | **51.585.000** | **4.556.000** | **8.83** | **20.234.000** |

1. **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.475.250, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 3.475.250; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 3.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 3.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 475.250, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 475.250 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017

*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian |  Periode Neraca  | Kenaikan/Penurunan |
| **2018** | **2017** | **Rp.** | **%** |
| Aset |  |  |  |  |
|  Aset Lancar | **3.475.250** | **1.301.275** | **2.173.975** | **167.06** |
|  Aset Tetap | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  Aset Lainnya | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Jumlah Aset | **3.475.250** | **1.301.275** | **2.173.975** | **167.06** |
| Kewajiban |  |  |  |  |
|  Kewajiban Jangka Pendek | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0,00** |
|  Kewajiban Jangka Panjang | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Jumlah Kewajiban | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0,00** |
| Ekuitas Dana |  |  |  |  |
|  Ekuitas Dana Lancar | **475.250** | **1.301.275** | **(826.025)** | **(63.48)** |
|  Ekuitas Dana Investasi | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Jumlah Ekuitas Dana | **475.250** | **1.301.275** | **(826.025)** | **(63.48)** |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana | **3.475.250** | **1.301.275** | **2.173.975** | **167.06** |

1. **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 11.718.541 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 11.718.541) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar (Rp. 11.718.541) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 11.718.541)

1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 1.301.275 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 11.718.541) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 10.892.516 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp. 475.250.

1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

1. *LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017**

***( dalam satuan Rupiah*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uraian | Catatan | TA 2018 | TA 2017 |
| **Anggaran**  | **Realisasi** | **%**  | **Realisasi** |
| A. | **Pendapatan Negara dan Hibah** | **B.1** |  |  |  |  |
| 1. | **Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **B.1.1** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
|  | **Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| B. | **Belanja Negara** | **B.2** |  |  |  |  |
| 1. | **Belanja Pegawai** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| 2. | **Belanja Barang** |  | **51.585.000** | **4.556.000** | **8.83** | **19.922.000** |
| 3. | **Belanja Modal** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
|  | **Jumlah Belanja Negara** |  | **51.585.000** | **4.556.000** | **8.83** | **19.922.000** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *NERACA PERBANDINGAN*

# II. Neraca

 **PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**NERACA**

**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2018 | 31 Desember 2017 |
| ASET |  |  |  |  |
| Aset Lancar | **C.1** |  |  |  |
| Kas dan Bank |  |  |  |  |
|  | **Kas di Bendahara Pengeluaran**  | **C.1.** |  | **3.000.000** | **0** |
|  | **Persediaan** | **C.1.** |  | **475.250** | **1.301.275** |
|  | **Jumlah Aset Lancar** |  |  | **3.475.250** | **1.301.275** |
| Aset Tetap  | **C.2** |  |  |  |
|  | **Tanah**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Peralatan dan Mesin**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Gedung dan Bangunan**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Aset Tetap Lainnya**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Konstruksi dalam Pengerjaan**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Aset Tetap**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Aset** |  |  | **3.475.250** | **1.301.275** |
| KEWAJIBAN |  |  |  |  |
| Kewajiban Jangka Pendek  | **C.5** |  |  |  |
|  | **Uang Muka dari KPPN**  | **C.5.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** |  |  | **3.000.000** | **0** |
|  | **Jumlah Kewajiban** |  |  | **3.000.000** | **0** |
| EKUITAS |  |  |  |  |
| Ekuitas Dana Lancar | **C.6** |  |  |  |
|  | **Jumlah Ekuitas Dana** |  |  | **475.250** | **1.301.275** |
|  | **Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana** |  |  | **3.475.250** | **1.301.275** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN OPERASIONAL*

# III. Laporan Operasional

 **PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2018  | 2017  |
| Kegiatan Operasional |  |  |  |  |
| Pendapatan |  |  |  |  |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | **D.1** |  | **0** | **0** |
| Jumlah Pendapatan |  |  |  |  |
| Beban |  |  |  |  |
|  | **Beban Pegawai** | **D.** | **2** | **0** | **0** |
|  | **Beban Persediaan**  | **D.** | **3** | **11.247.541** | **2.831.500** |
|  | **Beban Jasa**  | **D.** | **4** | **471.000** | **0** |
|  | **Beban Pemeliharaan** | **D.** | **5** | **0** | **0** |
|  | **Beban Perjalanan Dinas**  | **D.** | **6** | **0** | **15.190.000** |
|  | **Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat** | **D.** | **7** | **0** | **0** |
|  | **Beban Bantuan Sosial** | **D.** | **8** | **0** | **0** |
|  | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **D.** | **9** | **0** | **0** |
|  | **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **D.** | **10** | **0** | **0** |
|  | **Beban Lain-lain** | **D.** | **11** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Beban** |  |  | **11.718.541** | **18.021.500** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional** |  |  | **(11.718.541)** | **(18.021.500)** |
| Kegiatan Non Operasional  | **D.** | **12** |  |  |
|  | **Surplus Penjualan Aset Non Lancar** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Defisit Penjualan Aset Non Lancar**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Defisit Selisih Kurs**  |  |  | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **0** | **70.000** |
|  | **Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **0** | **(70.000)** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa** |  |  | **(11.718.541)** | **(18.091.500)** |
| Pos Luar Biasa | **D.**  | **13** | 0 | 0 |
|  | **Pendapatan PNBP** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban Perjalanan Dinas** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Beban Persediaan**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) Laporan Operasional** |  |  | **(11.718.541)** | **(18.091.500)** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

# IV. Laporan Perubahan Ekuitas

 **PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2018 | 2017 |
| Ekuitas Awal | **E.** | **1** | **1.301.275** | **140.000** |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | **E.** | **2** | **(11.718.541)** | **(45.810.725)** |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar |  |  |  |  |
| Lain-lain |  |  |  |  |
|  | **Koreksi Nilai Persediaan** | **E.** | **3** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Aset Tetap**  | **E.** | **4** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Atas Beban**  | **E.** | **5** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Atas pendapatan** | **E.** | **6** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Lain-lain**  | **E.** | **7** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Lain-lain** |  |  | **0** | **0** |
| Transaksi Antar Entitas  | **E.** | **8** | **10.892.516** | **46.972.000** |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS |  |  | **(826.025)** | **1.161.275** |
| Ekuitas Akhir |  |  | **475.250** | **1.301.275** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

# V. Catatan atas Laporan Keuangan

## Penjelasan Umum

### Dasar Hukum

|  |
| --- |
| * 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 |
| * 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 |
| * 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
 |
| * 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 |
| * 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
 |

### Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun

 Visi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

Visi Dilmil III-13 Madiun bertujuan agar menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah Misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer III - 13 Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer III - 13 Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksebilitas putusan hakim.
4. Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
6. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik.
7. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
8. Meningkatnya kualitas pengawasan.
9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.

### Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah sebagai berikut:

#### Pendapatan LRA

* + Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
	+ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
	+ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
	+ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Pendapatan LO

* Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
* Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
* Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
* Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

####  Belanja

* Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
* Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
* Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
* Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

####  Beban

* Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
* Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
* Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

####  Aset

* Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
* Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

* Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
* Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
* Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
* Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
* Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
* Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

* Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
* Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
* Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
* Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
* Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
* Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### Piutang Jangka Panjang

* Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
* TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
* TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
* TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

* Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
* Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
* Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### Kewajiban

* Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
* Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
	+ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

* + Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

* Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### Penyisihan Utang Tidak Tertagih

* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
* Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
| Lancar | **Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo** | **0.5%** |
| Kurang Lancar | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan** | **10%** |
| Diragukan | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan** | **50%** |
| Macet | 1. **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan**
2. **Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**
 | **100%** |

#### Penyusutan Aset Tetap

* Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
* Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
	+ - 1. Tanah
			2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
			3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
* Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
* Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
* Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

|  |  |
| --- | --- |
| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
| Peralatan dan Mesin | **2 s.d. 20 tahun** |
| Gedung dan Bangunan | **10 s.d. 50 tahun** |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | **5 s.d. 40 tahun** |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | **4 tahun** |

#### Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pendapatan Negara dan Hibah |
| ***Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 0*** | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. |
|  | Belanja  |
| ***Realisasi Belanja Negara : Rp. 51.585.000***  | Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 4.556.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 8.83 % dari anggaran senilai Rp. 51.585.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian |  30 Juni TA 2018 |
| **Pagu** | **Realisasi** | **%** |
|  Belanja Pegawai | **0** | **0** | **0,00** |
|  Belanja Barang | **51.585.000** | **4.556.000** | **8.83** |
|  Belanja Modal | **0** | **0** | **0,00** |
|  Total Belanja Bruto | **51.585.000** | **4.556.000** | **8.83** |
|  Pengembalian Belanja |  | **0** | **0** |
|  Total Belanja Netto | **51.585.000** | **4.556.000** | **8.83** |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018*(dalam satuan Rupiah)* ***Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016 & 2015*** Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018 | TA 2017  | Naik (Turun) |
| **Rp.** | **%** |
|  Belanja Pegawai | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  Belanja Barang | **4.556.000** | **19.922.000** | **(15.366.000)** | **(33.72)** |
|  Belanja Modal | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Total Belanja | **4.556.000** | **19.922.000** | **(15.366.000 )** | **(33.72)** |

 |
|  | Belanja Barang |
| ***Realisasi Belanja Barang : Rp. 4.556.000***  | Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 4.556.000 dan Rp. 19.922.000. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017  | Perubahan |
|  | **Realisasi** | **Realisasi** | **Rp.** | **%** |
| Belanja Barang Non Operasional  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Belanja Barang Lainnya | **4.556.000** | **4.732.000** | **(176.000)** | **(0.38)** |
| Belanja Perjalanan Biasa | **0** | **15.190.000** | **(15.190.000)** | **(100.00)** |
| Total Belanja Brutto | **4.556.000** | **19.922.000** | **(15.366.000)** | **(33.72)** |
| Pengembalian Belanja | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Total Belanja Netto | **4.556.000** | **19.922.000** | **(15.366.000)** | **(33.72)** |

 |

## Penjelasan atas Pos-pos Neraca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Aset Lancar: Rp. 3.475.250*** | Aset LancarNilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.475.250 dan Rp. 1.301.275.Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uraian | TA 2018 | TA 2017 |
|  | **Kas di Bendahara Pengeluaran**  | **3.000.000** | **0** |
|  | **Persediaan** | **475.250** | **1.301.275** |
|  | **Total Aset Lancar** | **3.475.250** | **1.301.275** |

 |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran |
| ***Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 3.000.000***  |  Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis | 30 Juni TA 2018 | 30 Juni TA 2017 |
| 1 | **Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan** | **3.000.000** | **-** |
|  | **Jumlah** | **3.000.000** | **0** |

 |
|  | Persediaan |
| ***Persediaan: Rp. 475.250*** | Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 475.250 dan Rp. 1.301.275. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | 30 Juni 2018  | 31 Desember 2017  |
| 1 | **Barang Konsumsi** | **475.250** | **1.301.275** |
| 2 | **Amunisi** | **0** | **0** |
| 3 | **Bahan Untuk Pemeliharaan** | **0** | **0** |
| 4 | **Suku Cadang** | **0** | **0** |
| 5 | **Pita Cukai, Materai dan Leges** | **0** | **0** |
| 6 | **Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat** | **0** | **0** |
| 7 | **Bahan Baku** | **0** | **0** |
| 8 | **Barang dalam Proses** | **0** | **0** |
| 9 | **Persediaan untuk Tujuan Strategis** | **0** | **0** |
| 10 | **Persediaan Barang Hasil Sitaan** | **0** | **0** |
| 11 | **Persediaan lainnya** | **0** | **0** |
|  | **Total** | **475.250** | **1.301.275** |

 |
|  | Aset Tetap |
| ***Aset Tetap : Rp. 0***  | Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :  |
|  | Tabel 12 Rincian Aset Tetap*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | TA 2018  | TA 2017 | Perubahan |
| 1 | **Tanah** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | **Peralatan dan Mesin** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | **Gedung dan Bangunan** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | **Jalan , Irigasi, dan Jaringan** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | **Aset Tetap Lainnya** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Konstruksi dalam Pengerjaan** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Akumulasi Penyusutan** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Nilai Buku Aset Tetap** | **0** | **0** | **0** |

 |
|  | Tanah |
| ***Tanah: Rp. 0***  | Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :Tabel 13 Rincian Saldo Tanah

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | KIB | Luas (m2) | No. Sertifikat | Atas Nama | Peruntukan | Jumlah |
| - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jumlah |  |  |  |  | **0** |

 |
|  | Peralatan dan Mesin |
| ***Peralatan dan Mesin : Rp. 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Saldo per 30 Juni 2017 | 0 |
|  Mutasi Tambah |  |
|   |  |
|  Mutasi Kurang |  |
|   |  |
|  Saldo per 30 Juni 2018 | **0** |
|  Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018 | **0** |
|  Nilai Buku 30 Juni 2018 | **0** |

 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.  |
|  | Gedung dan Bangunan |
| ***Gedung dan Bangunan : Rp. 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Saldo per 30 Juni 2017 | 0 |
|  Mutasi Tambah |  |
|   |  |
|  Mutasi Kurang |  |
|   |  |
|  Saldo per 30 Juni 2018 | **0** |
|  Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018  | **0** |
|  Nilai Buku 30 Juni 2018 | **0** |

 Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. |
|  | Jalan , Irigasi, dan Jaringan |
| ***Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Saldo per 30 Juni 2017 | 0 |
|  Mutasi Tambah |  |
|   |  |
|  Mutasi Kurang |  |
|   |  |
|  Saldo per 30 Juni 2018 | **0** |
|  Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018 | **0** |
|  Nilai Buku 30 Juni 2018 | **0** |

 Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. |
|  | Aset Tetap Lainnya |
| ***Aset Tetap Lainnya: Rp. 0***  | Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Saldo per 30 Juni 2017 | 0 |
|  Mutasi Tambah |  |
|   |  |
|  Mutasi Kurang |  |
|   |  |
|  Saldo per 30 Juni 2018 | **0** |
|  Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018 | **0** |
|  Nilai Buku 30 Juni 2018 | **0** |

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. |
|  | Konstruksi dalam Pengerjaan |
| ***Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0***  | Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap |
| ***Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [lra.ner13Sst]***  | Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| 1 | **Peralatan dan Mesin** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | **Gedung dan Bangunan** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | **Jalan , Irigasi, dan Jaringan** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | **Aset Tetap Lainnya** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah** | **0** | **0** | **0** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kewajiban Jangka Pendek |
|  | Uang Muka dari KPPN |
| ***Uang Muka dari KPPN:*** ***Rp. 3.000.000***  |  Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. |
|  | Ekuitas |
| ***Cadangan Piutang:******Rp. 475.250*** | Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 475.250 dan Rp. 1.301.275. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.Per tanggal 30 Juni 2018 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 3.000.000  |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional |
| Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak |
| Beban Pegawai |
| Beban Persediaan |
| ***Beban Persediaan : Rp. 475.250***  | Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 475.250 dan Rp. 1.301.275. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017dan 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018 | TA 2017 | Naik(Turun) | % |
|  Beban Persediaan Konsumsi | **2.831.500**  | **4.288.000**  | **(1.456.500)**  | **(33.96)**  |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Persediaan Suku Cadang | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Persediaan Lainnya | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Persediaan | **2.831.500**  | **4.288.000** | **(1.456.500)** | **(33.96)** |

 |
| Beban Jasa |
| ***Beban Jasa : Rp.0***  | Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
|  Beban Langganan Daya dan Jasa | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Jasa Pos dan Giro | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Jasa Konsultan | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Jasa Profesi | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Jasa Lainnya | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Jasa | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Beban Pemeliharaan |
| ***Beban Pemeliharaan: Rp. 0***  | Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017 | Naik(Turun) | % |
|  Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Pemeliharaan lainnya | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Pemeliharaan | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Beban Perjalanan Dinas |
| ***Beban Perjalanan Dinas : Rp. 0***  | Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 15.190.000 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
|  Beban Perjalanan Biasa | **0** | **15.190.000** | **(15.190.000)**  | **(100.00)** |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Perjalanan Dinas | **0**  | **15.190.000**  | **(15.190.000)** | **(100.00)** |

 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| ***Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0***  | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
|  Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Beban Bantuan Sosial |
| ***Beban Bantuan Sosial : Rp.0***  | Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial  per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018 | TA 2017 | Naik(Turun) | % |
|  Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Bantuan Sosial | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi |
| ***Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.***  | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018 | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
|  Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya |  |  |  |  |
| Jumlah Penyusutan |  |  |  |  |
| Beban Amortisasi Aset tak Berwujud |  |  |  |  |
| Beban Penyusutan Aset lain-lain |  |  |  |  |
| Jumlah Amortisasi |  |  |  |  |
|  Total Beban Penyusutan dan Amortisasi | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih |
| ***Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0***  | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih  per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018 | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
|  Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Beban Lain-lain |
| ***Beban Lain-Lain : Rp.0***  | Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain  per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
|  Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Beban Lain-lain | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Kegiatan Non Operasional |
| ***Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0***  | Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Penjualan Alat Angkut Darat | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Penjualan Alat Kantor |  |  |  |  |
|  Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Pos Luar Biasa |
| ***Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0***  | Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa  per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018 | TA 2017  | Naik(Turun) | % |
| Pendapatan PNBP | **0**  | **0**  | **0**  | **0**  |
| Beban Perjalanan Dinas | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Beban Persediaan | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  Total Pos Luar Biasa | **0**  | **0** | **0** | **0** |

 |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas |
| Ekuitas Awal |
| ***Ekuitas Awal : Rp. 1.301.275***  | Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.301.275 dan Rp. 140.000  |
| Surplus (defisit) LO |
| ***Surplus(defisit) LO : Rp. (11.718.541)***  | Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp. 11.718.541) dan (Rp. 18.091.500) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. |
| Koreksi Nilai Persediaan |
| ***Koreksi Nilai Persediaan : Rp. 0***  | Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018adalah sebagai berikut:Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  per 30 Juni TA 2018 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | Koreksi |
| Barang Konsumsi | **0**  |
| Suku Cadang | **0** |
| Barang Persediaan Lainnya | **0** |
|  Total Koreksi Nilai Persediaan | **0** |

  |
| Koreksi Aset Tetap |
| ***Koreksi Aset Tetap : Rp. 0***  | Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.  |
| Koreksi atas Beban |
| ***Koreksi Aset Beban : Rp. 0*** | Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban  per 30 Juni TA 2018*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | Koreksi |
| Beban Pegawai | **0**  |
| Beban Jasa | **0** |
|  Total Koreksi atas beban | **0** |

 |
| Koreksi atas Pendapatan |
| ***Koreksi atas Pendapatan : Rp. 0*** | Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018adalah sebagai berikut:Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan  per 30 Juni TA 2018*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | Koreksi |
| Pendapatan Jasa Pelatihan | **0**  |
| Pendapatan Lainnya | **0** |
|  Total Koreksi atas Pendapatan | **0** |

 |
| Ekuitas Akhir |
| ***Ekuitas Akhir : Rp. 475.250*** | Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 475.250 dan Rp. 1.970.500. |

## Pengungkapan Penting Lainnya

### Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### Pengungkapan Lain-lain

#### Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan BPK periode Juni 2018

#### Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Belanja Secara Akrual periode Juni 2018.

#### Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0. -

|  |
| --- |
| Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3 Tidak dapat biaya perkara pada Pengadilan Militer III-13 Madiun. |

#### Revisi DIPA

Revisi DIPA ke-1 terkait perubahan halaman III DIPA dan Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Agggaran, Revisi dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018.

#### Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB pada Semester I TA 2018.

#### Catatan Penting Lainnya

Sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / SK / 03 / I / 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Pengiji SPP dan Penerbit SPM, serta Staf Pengelola Anggaran di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / SK / 01 / I / 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran. maka terbentuk Tim Keuangan atas nama :

KPA : Awan Karunia Sanjaya, SH., MH. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P

PPK : Mulyono Sertu NRP. 31970176050877

PPSPM : Gatot Suprapto NIP. 196805031991031009

Bendahara Pengeluaran : Dodit Puguh Prasetyo Serka NRP. 531806

Pada tanggal 05 Maret 2018 Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun atas nama Kapten Awan Karunia Sanjaya, SH., MH Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P melaksanakan Pendidikan Calon Hakim Militer sesuai dengan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 212/DjMT/Ratgas/2/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Perintah untuk mengikuti Pendidikan Calon Hakim Militer. Sehingga Kadilmil III-13 Madiun sesuai dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna barang Mahkamah Agung RI Nomor 42 / PA / SK / XII / 2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di Bawahnya memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan atas nama Gatot Suprapto untuk melaksanakan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/32/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, disamping itu Kadilmil III-13 Madiun mengajukan permohonan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengangkat PNS Gatot Suprapto sebagai Kuasa pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun seuai denga Surat Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/KP.04.6/23/III/2018tanggal 28 Maret 2018 tentang Usulan Pejabat Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dilmil III-13 Madiun.

Pada tanggal 12 April 2018 Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/PA/SK/IV/2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Militer III-13 Madiun, dalam SK tersebut Sekma menunjuk serta mengangkat PNS Gatot Suprapto NIP. 196805031991031009 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna barang Dilmil III-13 Madiun sampai dengan terdapat penunjukan / penetapan Sekretaris pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

*LAPORAN PENDUKUNG*

# Laporan-laporan Pendukung

## Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

1. *RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Militer III - 13 Madiun**

**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**

**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018**

Tabel 15 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  Aset Tetap | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| A. | **Peralatan dan Mesin** |  |  |  |  |
| B. | **Gedung dan Bangunan** |  |  |  |  |
| C. | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** |  |  |  |  |
| D. | **Aset Tetap Lainnya** |  |  |  |  |
| E. | **Aset Tetap yang Tidak Digunakan** |  |  |  |  |
|  | **Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** |  |  |  |
|  | **Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya** |  |  |  |

1. *INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL*

## Informasi Pendapatan dan Belanja Secara